



Gerakan Reformasi 1998 dan Keterlibatan Mahasiswa di Tingkat Lokal: Kasus Sumatera Barat

Hendra Naldi¹, Uun Lionar^{2*}, Ridho Bayu Yefterson³, Yelda Syafrina

¹ Universitas Negeri Padang; hendranaldi@fis.unp.ac.id

² Universitas Negeri Padang; uunlionar@fis.unp.ac.id*

³ Universitas Negeri Padang; ridhobayu@fis.unp.ac.id

⁴ Universitas Negeri Padang; yeldasyafrina@fis.unp.ac.id

*Korespondensi

Dikirim: 09-04-2022; Diterima: 30-08-2022; Diterbitkan: 29-12-2022

Abstract: The 1998 Reformation Movement, which was led by students, was a social movement that had an impact on social and political changes in Indonesia in the following period. In the midst of the dryness of the study and writing of the history of the 1998 Reformation Movement, this paper will look at how the dynamics of students at the local level welcomed this movement through the eyes of local history. This study aims to describe the roots of the 1998 Reform Movement in Indonesia and then highlight the dynamics of students at the local level in West Sumatra in the 1998 Reform Movement. This study uses a historical research method consisting of four stages of activity in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that West Sumatran students were highly sensitive to the socio-political problems that engulfed the Indonesian nation at that time. As intellectuals, students respond to this issue by holding meetings, free pulpits, and holding demonstrations to criticize the government's policies and attitudes which are considered slow in solving the nation's problems. To facilitate coordination and consolidation of the movement, students formed the West Sumatera Student Communication Forum (FKMSB), which later became an important forum in gathering the strength of the students movement in West Sumatra during the transition period.

Keywords: reform movement; students; West Sumatera

Abstrak: Gerakan Reformasi 1998 yang dimotori oleh kalangan mahasiswa merupakan sebuah gerakan sosial yang berdampak terhadap perubahan sosial dan politik Indonesia pada periode berikutnya. Di tengah keringnya kajian dan penulisan sejarah Gerakan Reformasi 1998, maka tulisan ini akan melihat bagaimana dinamika mahasiswa di tingkat lokal menyambut gerakan ini melalui kacamata sejarah lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akar Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, dan kemudian menyoroti dinamika mahasiswa pada tingkat lokal di Sumatera Barat dalam Gerakan Reformasi 1998 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan kegiatan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Sumatera Barat memiliki sensitivitas yang tinggi atas permasalahan sosial politik yang sedang melanda bangsa Indonesia ketika itu. Sebagai kalangan intelektual mahasiswa merespon isu tersebut dengan mengadakan pertemuan, mimbar bebas, hingga melakukan demonstrasi dalam rangka mengkritik kebijakan dan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi gerakan, mahasiswa membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat (FKMSB) yang kemudian menjadi wadah penting dalam menghimpun kekuatan gerakan Mahasiswa di Sumatera Barat selama masa transisi tersebut.

Kata Kunci: gerakan reformasi; mahasiswa; Sumatera Barat



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Gerakan Reformasi tahun 1998 yang terjadi di Sumatera Barat adalah suatu yang tidak dapat terpisahkan dari aksi gerakan mahasiswa yang jauh lebih besar saat itu, yakni gerakan yang menuntut perbaikan atas keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang memuncak dalam krisis moneter di tahun 1998 (Priambodo, 2016). Gerakan tersebut bukan gerakan yang lahir dengan tiba-tiba, melainkan gerakan usaha yang telah dibangun oleh kalangan mahasiswa jauh sebelum itu. Gerakan tersebut muncul melalui dialektika yang panjang, sepanjang era pemerintah Orde Baru. Akumulasi ketidakpuasan, kekecewaan dan ketertindasan yang terus menumpuk dalam dunia kemahasiswaan saat itu melahirkan krisis kepercayaan yang mendalam. Kekecewaan yang terus menebal dalam puluhan tahun pada akhirnya meletus dalam satu gerakan mahasiswa dengan tuntutan reformasi (Suwirta, 1998).

Berita tentang gerakan reformasi tersebar di berbagai daerah, hingga sampai di Sumatera Barat, menyikapi hal tersebut mahasiswa segera menjadi bagian dalam menyuarakan kritik kepada pemerintah Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tersebut. Mahasiswa dengan yang berasal dari berbagai basis kelompok sosial dan pendidikan muncul menjadi kekuatan pendorong sekaligus kelompok “penekan” dalam mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan atas krisis sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi, hingga menuntut Presiden Soeharto untuk segera meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (Kahin, 2008). Menurut Hadiz (2000) gerakan ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengoreksi kepemimpinan nasional yang dianggap telah “pikun” menjalankan roda pemerintahan.

Gerakan mahasiswa adalah bentuk ekspresi *collective behavior* yang pada kecenderungannya menempatkan keberpihakan pada kepentingan bersama dan mengedepankan gerakan moral (Anang & Husein, 2020; Nasri, 1993; Sarwono, 1998; Smelser, 1970). Tuntutan gerakan mahasiswa pada umumnya adalah perubahan. Gerakan ini tumbuh untuk memperbaiki kondisi sosial yang ada untuk digantikan dengan keadaan yang lebih memenuhi harapan hidup bersama. Terdapat dua fungsi gerakan mahasiswa yakni sebagai proses perubahan, gerakan mahasiswa menumbuhkan gerakan sosial serta mendorong perubahan politik (Altbach, 1988). Gerakan Reformasi tahun 1998 di tingkat nasional maupun lokal merupakan sebuah bentuk dari gerakan sosial, yakni suatu gerakan dari suatu kelompok organisasi atau masyarakat yang bermaksud ingin mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang sudah ada, atau mengoreksi kondisi sosial yang sedang terjadi serta menuntut kehidupan sosial yang lebih baik (Orum, 1974).

Hobson (2003) menyebutkan bahwa gerakan sosial melingkupi keseluruhan sesuatu mulai dari kerusuhan yang terjadi hanya beberapa jam sampai pada organisasi perlawanan yang

permanen. Gerakan sosial lazim bersifat reaktif dan korektif terutama gerakan rakyat yang memprotes perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mengancam kehidupan yang berlaku (Burke, 2015).

Munculnya gerakan sosial dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap realitas keadaan yang ada di lingkungan sosial, gejolak yang timbul melahirkan respon kolektif yang reaktif sebagai tuntutan bersama agar dilakukannya perbaikan keadaan oleh pemangku kebijakan. Smelser (1970) mengemukakan 5 (lima) faktor penyebab munculnya gerakan sosial, diantaranya: (1) adanya kondisi struktural seperti keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang tidak stabil; (2) lahirnya gerakan sosial didorong oleh ketegangan di tengah masyarakat, termasuk berbagai macam pola konflik sosial (vertikal maupun horizontal) yang memicu ketegangan struktural; (3) semakin parahnya instabilitas, serta ketidakmampuan penguasa dalam mengendalikan keadaan; (4) munculnya aktor-aktor penggerak yang mengarahkan suatu kegiatan protes atas instabilitas; (5) gerakan sosial semakin memuncak jika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang menekan jalannya gerakan.

Sementara itu, Horton & Hunt (1993) mengemukakan 5 (lima) proses gerakan sosial, diantaranya: (1) proses ketidaktenteraman, hal ini disebabkan oleh keadaan yang memprihatinkan secara berkepanjangan, dan semakin meningkat; (2) tahap perangsangan, yakni saat perasaan tidak puas semakin besar, penyebab-penyebab munculnya masalah sudah teridentifikasi, dan saran-saran untuk tindak lanjut sudah diperdebatkan; (3) tahap formalisasi, yaitu saat aktor sudah muncul, rencana sudah disusun dengan baik, pendukung sudah diarahkan, serta taktik sudah dimatangkan; (4) tahap institusionalisasi, yaitu saat organisasi sudah diambil alih dari para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi gerakan serta program sudah diwujudkan. Tahap ini menjadi akhir kegiatan aktif dari gerakan sosial; (5) tahap pembubaran (disolusi), yaitu saat gerakan sosial berubah menjadi organisasi tetap atau sebaliknya mengalami pembubaran.

Gerakan mahasiswa dalam prakteknya bukanlah hal yang ahistoris, kemunculannya dalam konteks perilaku kolektif disebabkan oleh aspek fluktuatif yang berasal dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta aspek spontanitas yang tidak stabil. Gerakan mahasiswa telah melalui proses waktu yang panjang dan cakupan wilayah yang luas, gerakan mahasiswa bukan sekadar sesuatu yang terjadi dengan sendirinya dengan fokus Indonesia, melainkan gerakan mahasiswa di Indonesia adalah bagian dari gerakan mahasiswa secara luas di dunia. Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa terjadi dalam banyak periode waktu, keheroikan gerakan diteruskankan dari generasi ke generasi (Altbach, 1988; Matulesy & Ancok, 1997).

Gerakan mahasiswa di Indonesia muncul di tahun 1966 sebagai respon atas dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI), gerakan ini juga dikenal sebagai perintis lahirnya Orde Baru. Pada periode tersebut mahasiswa membentuk sebuah kesatuan yang dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Memasuki zaman Orde Baru pada tahun 1972, protes terhadap pemerintah digerakkan oleh mahasiswa dengan menggugat kecurangan Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum tahun 1972 yang dianggap melakukan kecurangan, mahasiswa juga menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang menghabiskan biaya

besar sedangkan masyarakat miskin masih membutuhkan perhatian (Bertrand, 2012; Cribb & Kahin, 2012). Akumulasi kekecewaan atas pemerintah Orde Baru memuncak menjadi gerakan reformasi yang menuntut presiden Soeharto untuk meletakkan jabatannya. Momentum ini semakin diperkuat dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda Asia Tenggara. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan krisis menjadi alasan kuat bagi kalangan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dengan tuntutan reformasi.

Gerakan Reformasi tahun 1998 di Sumatera Barat menjadi “*entry point*” untuk memahami dinamika gerakan mahasiswa daerah pada periode tersebut. Bahkan keberadaan gerakan mahasiswa di tingkat daerah menjadi penentu dari sukseksi gerakan reformasi ketika itu, mengingat letupan-letupan reformasi yang menggema dari berbagai daerah terakumulasi menjadi kekuatan besar yang mendobrak rezim Orde Baru tersebut. Oleh sebab itu, eksistensi gerakan reformasi di tingkat lokal sudah seharusnya mendapat tempat dan menjadi perhatian, agar didapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika gerakan reformasi di tahun 1998 tersebut. Di tengah keringnya penelitian mengenai dinamika gerakan mahasiswa tahun 1998 di tingkat lokal, maka penelitian ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran umum faktor pendorong terjadinya gerakan di tingkat lokal, aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, serta aktor-aktor yang ikut serta di dalamnya.

Penelitian terkait dengan gerakan mahasiswa telah dilakukan diantaranya Jazimah (2013) mengenai gerakan mahasiswa Malari tahun 1974, penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa Malari menjadi titik awal perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto secara besar-besaran, pasca peristiwa ini pemerintah memperkuat dan memperketat aktivitas mahasiswa hingga melahirkan normalisasi kehidupan kampus. Penelitian Supriyanto (2022) dengan judul Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998, penelitian ini mengungkapkan bahwa gerakan massif yang dilakukan mahasiswa di tahun 1998 adalah puncak dari perjuangan mahasiswa pada masa Orde Baru, akumulasi permasalahan yang melanda Indonesia dari berbagai aspek menjadi isu yang mendorong Soeharto harus mundur dari kursinya sebagai presiden. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan Sinaga (2018) dengan judul Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Padang dalam Gerakan Mahasiswa Tahun 1990-1998 di Kota Padang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai organisasi yang kecil di Kota Padang, GMKI ikut berperan dalam pergumulan bangsa dan negara. GMKI cabang Padang melakukan gerakan melalui diskusi-diskusi kelompok, mimbar bebas, dan ikut serta dalam aksi demonstrasi bersama organisasi kemahasiswaan lainnya di Sumatera Barat. Keikutsertaan GMKI dalam dinamika kebangsaan menjadi sumbangsih organisasi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian terkait di atas, maka penelitian ini difokuskan pada gerakan mahasiswa di tahun 1998 yang terjadi di tingkat lokal Sumatera Barat, dengan memahami dinamika yang terjadi pada tingkat makro (nasional) hingga mengeskplorasi peristiwa yang terjadi di tingkat mikro (Sumatera Barat). Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana dinamika daerah dalam merespon gerakan yang bersifat massif, sekaligus melihat bagaimana aktor gerakan menjalankan peran dalam sukseksi gerakan tersebut. Selain itu, urgensi penelitian juga untuk mengungkapkan partisipasi mahasiswa lokal serta upaya yang dilakukan dalam

membangun gerakan seperti mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat (FKMSB), serta saluran dan media yang digunakan untuk memobilisasi massa. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akar Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, dan kemudian menyoroti dinamika mahasiswa pada tingkat lokal di Sumatera Barat dalam Gerakan Reformasi 1998 tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan langkah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap kegiatan, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2016). Kegiatan heuristik dilakukan dengan mengeksplorasi data dari berbagai sumber yang relevan. Data wawancara didapatkan dari para aktor yang terlibat dalam gerakan reformasi, dalam hal ini adalah aktivis mahasiswa tahun 1998 di Sumatera Barat, data dokumentasi didapatkan melalui media massa lokal yang memberitakan mengenai gerakan reformasi tahun 1998 di Sumatera Barat seperti surat kabar Haluan dan Singgalang, dan sumber buku dijadikan sebagai rujukan sekunder untuk menganalisis peristiwa. Setelah data terkumpul maka dilakukan kritik sumber untuk menguji kesahihan dan keaslian data. Melalui kritik internal dan kritik eksternal maka didapatkan data dan fakta sejarah yang relevan untuk digunakan (Kuntowijoyo, 2013). Data dan fakta yang telah melewati kritik sumber disusun dan dipahami untuk kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah pemahaman yang utuh mengenai peristiwa gerakan reformasi 1998 di Sumatera Barat. Tahapan terakhir adalah historiografi, dengan menulis sejarah berdasarkan data dan fakta yang telah diinterpretasikan.

Hasil Penelitian

Akar Gerakan Reformasi 1998

Romantisme antara mahasiswa dan pemerintah semakin renggang dimulai sejak tahun 1974 ketika Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) meletus. Gerakan ini menuntut pemberantasan KKN, menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, dan menuntut pembubaran Lembaga Asisten Pribadi Presiden Soeharto (Argenti, 2016). Gerakan yang tidak tertata baik itu berubah menjadi gerakan penjarahan yang berakhir dengan kegagalan, beberapa mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap seperti Hariman Siregar dan Syahrir. Kegagalan gerakan 15 Januari 1974 membuka jalan bagi pemerintah Orde Baru untuk menindas kampus yang dianggap sebagai “sarang” kebebasan dan gerakan kritis. Pada tahun 1978 untuk membatasi gerakan mahasiswa, pemerintah menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) (Mustafidah, 2016; Ricklefs, 2016). Kebijakan tersebut membatasi mahasiswa untuk hanya beraktivitas di bidang akademik, serta menjauhi aktivitas politik yang dinilai dapat membahayakan posisi pemerintah (Kurniadi, 1987). Organisasi kemahasiswaan ditutup dan aktivis-aktivis kampus dilarang untuk mengadakan kegiatan organisasi. Agar terciptanya kestabilan politik pemerintah menetapkan Pancasila sebagai azas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi massa, hal ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap dunia kemahasiswaan (Cribb & Kahin, 2012; Hadiz, 2000). Jika merujuk pada pendapat Horton dan Hunt (1993) periode ini bisa dinamakan sebagai tahap ketidaktentraman dan tahap perangsangan awal dari

munculnya sebuah gerakan sosial. Keadaan demikian disebabkan ketidakpuasan dari kalangan mahasiswa atas aturan yang menyempitkan ruang gerak mereka.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi masa Orde Baru menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan dengan program-program yang terumus dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), seperti meningkatkan taraf perekonomian melalui sektor pertanian yang ditopang oleh Koperasi Unit Desa (KUD) melalui Bimbingan Massal (Bimas) yang untuk meningkatkan produksi beras, sehingga di tahun 1986 Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras (Booth, 2000). Akan tetapi keberhasilan ini tidak sebanding dengan sistem pemerintahan yang terbentuk ketika itu, dalam bidang politik pemerintah Orde Baru dinilai sebagai rezim yang otoriter. Presiden memiliki kekuatan yang sangat besar, dan negara menjadi semakin kuat sehingga menimbulkan bentuk pemerintahan yang sentralistik. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal menghasilkan formula berdemokrasi yang baik, karena di tahun 1972-1973 melalui fusi partai pemerintah telah menempatkan Golkar (Golongan Karya) sebagai alat politik yang dominan. Sementara itu, dua partai lainnya menjadi tandingan yang tidak sepadan agar tercipta kesan pelaksana praktek demokrasi (Bertrand, 2012).

Memasuki tahun 1990-an krisis moneter telah membawa kemerosotan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia pun merasakan dampak dari krisis ini. Krisis yang semula hanya terbatas pada kalangan menengah ke atas perlahan mulai mempengaruhi kalangan masyarakat bawah. Melambungnya harga barang kebutuhan pokok menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Krisis ini adalah pertama kali dalam sejarah Orde Baru, masyarakat diterpa kekalutan dengan memborong kebutuhan pokok yang ada di pasar untuk persediaan jika krisis tersebut semakin parah. Dalam sejarah Indonesia krisis seperti ini hanya dapat dibandingkan dengan masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia (1944-1945), dan masa transisi kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru (1964-1966). Ciri yang muncul dari fenomena krisis tersebut adalah suasana ketidakpastian, meningkatnya inflasi, serta kekalutan masyarakat dalam antrian membeli kebutuhan pokok (Suwirta, 1998).

Pertumbuhan ekonomi yang melaju dan dibanggakan oleh pemerintah Orde Baru pada kenyataannya tidak sekokoh yang diharapkan. Nilai tukar rupiah yang pada awalnya berkisar pada angka Rp. 2.300 per Dollar jatuh menjadi angka Rp. 12.000 per Dollar dan telah meluluhlantahkan perekonomian Indonesia. Krisis ini berdampak pula pada bidang sosial dimana meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Ketidaksanggupan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang diperparah dengan maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah menimbulkan masalah baru yang mengerucut menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akumulasi masalah yang semakin menumpuk pada saat itu berlarut pada tuntutan dari kalangan mahasiswa untuk segera dilakukan reformasi (Putra, 2003, p. 102).

Demonstrasi mahasiswa dalam skala besar di seluruh Indonesia mulai memanas sejak tahun 1997 yang juga melibatkan para akademis dan pimpinan perguruan tinggi. Tuntutan di mahasiswa di berbagai daerah ketika itu terumus dalam agenda reformasi nasional yaitu a)

sukses kepemimpinan nasional, b) amandemen Undang Undang Dasar 1945, c) penghapusan dwi fungsi ABRI, d) pemberantasan korupsi, e) supremasi hukum, dan f) otonomi daerah.

Gerakan Reformasi di Sumatera Barat Tahun 1998

Gerakan Reformasi tahun 1998 di Sumatera Barat adalah satu bagian gerakan mahasiswa di tingkat lokal yang meninggalkan banyak catatan. Gerakan ini adalah bentuk respon atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat saat itu. Gerakan yang masif tersebut diikuti oleh ribuan mahasiswa, gerakan ini dimotori oleh para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat intra kampus maupun ekstra kampus, seperti pengurus senat mahasiswa universitas, pengurus senat institut dan pengurus senat fakultas, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan lain sebagainya.



Gambar 1. Aksi mimbar bebas mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1998

Sumber: Arsip peneliti

Munculnya gerakan mahasiswa tahun 1998 di Sumatera Barat dalam merespon isu nasional ketika itu ditandai dengan pertemuan pimpinan organisasi kemahasiswaan se-Kota Padang di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol bulan Desember 1997. Beberapa tokoh mahasiswa yang hadir ketika itu antara lain Syarli Mubaraq dari Senat Mahasiswa Universitas Andalas, Mukhtar Efendi dari Senat Mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang, Ahmad Khairuddin dari Senat Mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH), Eka Vidya Putra dari HMI Cabang Padang, Jhon Mukhlis dari Badan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Padang (STTP), Syahrul Ramadhan Tanjung, Gusrizal dan Nuzran Joher dari Senat Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang (wawancara dengan Nuzran Joher, April 2021). Dalam merespon isu nasional pertemuan ini menghasilkan keputusan antara lain *pertama*, mengaktifkan kembali Forum Komunikasi Mahasiswa Padang (FKMP) sebagai alat perjuangan mahasiswa; *kedua*, untuk menjaga kesinergisan gerakan

disepakati untuk melaksanakan pertemuan rutin; *ketiga*, dalam rangka menyikapi krisis ekonomi yang sedang terjadi disepakati untuk segera melakukan aksi keprihatinan mahasiswa Sumatera Barat.

Merealisasikan aksi keprihatinan pada tanggal 7 Januari 1998, ratusan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat. Aksi tersebut membawa identitas sebagai FKMP (Forum Komunikasi Mahasiswa Padang). Mahasiswa melakukan orasi secara bergantian dengan tuntutan meminta perhatian anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atas persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang melanda Sumatera Barat. Aksi mahasiswa turun ke jalan ini mendapat respon dan sambutan dari masyarakat, bahkan beberapa media massa lokal seperti harian umum Haluan menjadikan aksi FKMP sebagai berita utama (Kahin, 2008).

Memasuki bulan Maret 1998, mahasiswa memperluas gerakannya ke daerah-daerah sekitar Sumatera Barat, melalui pertemuan pada tanggal 12 Maret 1998 maka didirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat (FKMSB). Rapat konsolidasi pendirian FKMSB dilaksanakan melalui tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama difasilitasi oleh Senat Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang. Pertemuan kedua dilaksanakan di Bukittinggi, di Lembaga Bantuan Hukum Andalas pada tanggal 21 Maret 1998, pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa orang aktivis mahasiswa antara lain Nuzran Joher, Gusrizal (IAIN Imam Bonjol Padang), Ifwandi (UMSB), Nanang, Akhyar, Fernaldi, Ardiyan (UBH), Mukhtar Efendi, Gun Sugianto (IKIP Padang), Jon Muklis (STTP), Syarli Mubaraq, Agusmandoni, Rahmatullah (Unand) dan Sulhasril, Jalzar (AQABA) (Putra, 2003). Pada pertemuan ini juga aktivis mahasiswa Sumatera Barat berhasil meletakkan beberapa agenda pokok yaitu: *pertama*, melakukan konsolidasi antar mahasiswa, *kedua*, rutin melakukan kajian dan saling menukar informasi tentang perkembangan kebangsaan, *ketiga*, bersama membangun visi dan misi gerakan. Pertemuan ketiga dilaksanakan di SMPT IKIP Padang, pada pertemuan ini pembicaraan lebih terfokus pada format atau bentuk dari organisasi yang mewadahi gerakan mahasiswa. Akhirnya diputuskan nama Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat sebagai wadah pemersatu mahasiswa dan organisasi tersebut tidak memiliki otoritas mewakili senat-senat Perguruan Tinggi di Sumatera Barat. Walau mendapat banyak kendala yang disebabkan oleh cara pandang yang berbeda antar mahasiswa dalam FKMSB, namun tidak dapat dinafikan bahwa FKMSB menjadi basis pergerakan yang efektif dalam menghimpun mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan di Sumatera Barat, FKMSB menjadi media pemersatu sekaligus membangun hubungan antar mahasiswa di Sumatera Barat yang selama ini renggang.

Aksi demonstrasi pertama yang mengatasnamakan FKMSB dilakukan di kampus Teknik Universitas Andalas Air Tawar pada tanggal 14 Maret 1998. Aksi demonstrasi beturut-turut terjadi pada bulan April hingga Mei 1998, dalam beberapa bulan tersebut dapat dikatakan tiada hari tanpa pergolakan, bagi mahasiswa yang ikut terlibat menganggap bahwa waktu selama 24 jam terasa tidak cukup untuk menyusun agenda aksi (Putra, 2003). Pada tanggal 16 April 1998 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu adalah Wiranto Arismunandar menyampaikan pernyataan yang tidak dapat diterima oleh kalangan mahasiswa, inti pernyataan tersebut adalah bahwa gerakan mahasiswa sudah tidak murni dan menuduh mahasiswa telah

berpolitik praktis (Suwirta, 1998). Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari mahasiswa, dan menimbulkan perdebatan yang hangat di kalangan kampus, bahkan di tengah masyarakat luas. Aktifis mahasiswa Sumatera Barat tidak ketinggalan merespon pernyataan tersebut, melalui FKMSB pada tanggal 20 April 1998 mahasiswa mendatangkan Amien Rais yang saat itu adalah tokoh berpengaruh sekaligus dikenal sebagai pelopor reformasi. Amien Rais menyampaikan orasi di lapangan kampus IKIP Padang dihadapan mahasiswa ribuan mahasiswa (Zed, 2019). Pada kesempatan itu mahasiswa menyangkal dengan tegas tuduhan bahwa mahasiswa telah terlibat politik praktis seperti yang disebut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar.

Pada tanggal 18 Mei 1998 kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Padang diduduki oleh mahasiswa Universitas Andalas, gedung DPRD Sumatera Barat di Ulak Karang diduduki oleh mahasiswa UBH dan IKIP Padang, dan kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Padang diduduki oleh mahasiswa IAIN Imam Bonjol menduduki. Aksi ini dilakukan untuk menguasai sarana vital publik. Di stasiun TVRI Sumatera Barat mahasiswa meminta agar diberi kesempatan untuk menyampaikan berita tentang demonstrasi yang mereka lakukan agar tidak dipandang oleh masyarakat sebagai gerakan yang anarkis dan brutal. Nuzran Joher selaku ketua Senat Mahasiswa IAIN Imam Bonjol diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan reformasi tersebut selama beberapa menit. Beberapa poin yang disampaikan antara lain *pertama*, mahasiswa menghimbau masyarakat Sumatera Barat agar responsif dan mendukung perjuangan mahasiswa dalam menuntut perbaikan keadaan politik, sosial, dan ekonomi. *Kedua*, mahasiswa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu yang tidak jelas sumbernya. *Ketiga*, mahasiswa mendesak Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Sidang Istimewa dan mendesak Presiden Soeharto meletakkan jabatannya (Sudarto, 2013, p. 13).

Tanggal 20 Mei 1998 merupakan tanggal yang bersejarah bagi mahasiswa Indonesia. Pada tanggal ini, gerakan serentak dilakukan untuk menuntut reformasi total atas penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Di Sumatera Barat yang terkonsentrasi di Kota Padang, mahasiswa melakukan gerakan demonstrasi dengan menduduki halaman kantor Gubernur Sumatera Barat (Zed, 2019). Aksi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa tersebut dipimpin oleh Syahrul Ramadhan Tanjung yang dipercaya sebagai koordinator lapangan. Penunjukan itu dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan aksi di kampus UBH Ulak Karang. Sementara itu, sebagai tim perumus pernyataan tuntutan dipercayakan kepada Sudarto dan Gusrizal. Tuntutan dalam aksi tersebut antara lain (1) segera dilakukan reformasi total di segala bidang; (2) segera lakukan Sidang Istimewa MPR, turunkan harga sembako; dan (3) turunkan Presiden Soeharto.



Gambar 2. Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Gubernur Sumatera Barat tahun 1998

Sumber: Arsip peneliti

Dalam aksi demonstrasi tersebut mahasiswa menyampaikan agar Gubernur Sumatera Barat Mukhlis Ibrahim dan Ketua DPRD Noer Bahri Pamuncak turut serta bergabung di tengah kerumunan mahasiswa. Dengan terpaksa akhirnya Gubernur dan Ketua DPRD memenuhi tuntutan mahasiswa tersebut. Tuntutan reformasi disampaikan oleh Syahrul Ramadhan Tanjung, hingga terakhir mahasiswa meminta kedua pejabat daerah itu untuk menandatangani isi tuntutan tersebut. Aksi demonstrasi berlangsung hingga menjelang sore hari dan acara diakhiri dengan pembacaan doa.

Sehari setelah aksi demonstrasi akbar dilaksanakan di berbagai daerah, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan kemundurannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan sekaligus menunjukkan Wakil Presiden BJ. Habibie sebagai penggantinya. Berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia disambut oleh mahasiswa di Sumatera Barat dengan suka cita. Aksi yang telah dilaksanakan berbulan-bulan pada akhirnya menemukan titik terang dengan terkabulnya tuntutan. Namun, dengan berakhirnya kepemimpinan Soeharto bukan berarti perjuangan mahasiswa sudah usai dalam menyuarakan tuntutan, karena banyak persoalan-persoalan lain yang kembali harus diperjuangkan oleh mahasiswa, salah satu isu yang menarik untuk diperjuangkan adalah isu kepemimpinan pemerintahan kedaerahan terutama mencermati persoalan KKN dan praktik-praktik illegal lainnya.

Mahasiswa menilai seiring dengan jalannya roda pemerintahan transisi yang memiliki agenda tunggal yaitu pelaksanaan reformasi total maka seluruh kekuatan Orde Baru harus ikut turun. Jika secara nasional sudah dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto, maka dilanjutkan dengan giliran kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Mahasiswa menilai seluruh kepala daerah yang berkuasa saat ini dipilih melalui cara yang tidak demokratis karena dipilih oleh legislatif yang juga terpilih dengan cara yang manipulatif.

Gerakan mahasiswa yang biasanya terkonsentrasi di Kota Padang akhirnya menyebar ke daerah-daerah. Beberapa aktifis mahasiswa yang selama ini berjuang di Padang melakukan aksi pulang kampung dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada di kampungnya masing-masing.

Kesimpulan

Keikutsertaan mahasiswa Sumatera Barat dalam Gerakan Reformasi tahun 1998 adalah bentuk respon mahasiswa lokal menanggapi isu-isu nasional. Gerakan massif tersebut telah mempengaruhi keadaan sosial politik Indonesia pada periode berikutnya. Kemunculan Gerakan Reformasi tahun 1998 merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa terhadap sistem pemerintahan yang otoriter dan maraknya praktek KKN di masa Orde Baru. Tekanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Normalisasi Kehidupan Kampus untuk membendung mahasiswa agar tidak bersikap kritis ternyata tidak mampu menahan arus balik perlawanan dan kritikan mahasiswa yang menuntut reformasi total dalam tubuh pemerintah. Gerakan mahasiswa 1998 menemukan momentum ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia di tahun 1997, dampak dari krisis ini mempertembal kekecewaan dan menjadi alasan bagi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi. Mahasiswa Sumatera Barat sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia tidak tinggal diam dalam mengamati fenomena krisis sosial, politik, dan ekonomi tersebut. Mereka segera merespon isu ini dengan melakukan kajian kritis dengan mengadakan mimbar bebas lintas kampus. Dengan inisiatif dari beberapa pimpinan organisasi, mereka segera mendirikan FKMSB sebagai wadah berhimpun dalam melakukan gerakan demonstrasi yang terjadi antara bulan Maret hingga Mei 1998.

Di tengah keringnya penelitian mengenai gerakan mahasiswa di daerah, hal ini dapat menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk mengungkapkan bagaimana dinamika gerakan mahasiswa di berbagai daerah dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi peluang besar, mengingat pasca diberlakukannya otonomi daerah berbagai persoalan muncul yang telah membuat banyak pemerintahan daerah harus berhadapan dengan protes atas berbagai kebijakan yang telah dibuat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh informan yang tidak dapat disebut satu persatu, atas kesediaan membantu memberikan informasi dan data terkait penelitian ini. Berkat dukungan moril dan material akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap peneliti berikutnya dapat menyempurnakan tulisan ini dengan melengkapi semua keterbatasan yang ada.

Daftar Rujukan

- Altbach, P. G. (1988). *Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecendrungan Masa Kini* (H. Sulistyono, Penerj.). Jakarta: Gramedia.
- Anang, A. A., & Husein, A. (2020). Genealogi Aliran-Aliran Politik dalam Islam. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 4(2), 68–79. <https://doi.org/10.29408/fhs.v4i2.2592>

- Argenti, G. (2016). Gerakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Mahasiswa Tahun 1974. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(1), 4–13. <https://doi.org/10.35706/jpi.v1i1.295>
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Booth, A. (2000). Poverty and Inequality in The Soeharto Era: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), 73–104. <https://doi.org/10.1080/00074910012331337793>
- Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial* (M. Zed, Penerj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2012). *Kamus Sejarah Indonesia* (G. Triwira, Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Hadiz, V. R. (2000). Retrieving the Past for the Future? Indonesia and the New Order Legacy. *Asian Journal of Social Science*, 28(2), 11–33. <https://doi.org/10.1163/030382400X00037>
- Hobson, B. (Ed.). (2003). *Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power* (Vol. 56). UK: Cambridge University. Diambil dari http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-4446.2005.00080_7.x
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1993). *Sosiologi* (Aminuddin, Penerj.). Jakarta: Erlangga.
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 3(01). <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>
- Kahin. (2008). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia (1926-1998)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniadi, E. (1987). *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Matulessy, A., & Ancok, D. (1997). Faktor-faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, (32), 88–104.
- Mustafidah, Z. (2016). Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1978-1983. *Avatara*, 4(1). Diambil dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/13986>
- Nasri, I. (1993). *Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Benteng Offset.
- Orum, A. M. (1974). On Participation in Political Protest Movements. *Journal of Applied Behavior Science*, 10, 181–207. <https://doi.org/10.1177/002188637401000206>
- Priambodo, P. (2016). Studi Komparasi Model Aksi Demonstrasi dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia Tahun 1966 dan 1998. *Risalah*, 2(6), 1–7.
- Putra, E. V. (2003). *Gerakan Mahasiswa dan Otoritarianisme Negara: Sketsa Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat 1958-1999*. Jakarta: Citra Pendidikan.
- Ricklefs, M. C. (2016). *Sejarah Indonesia Modern* (Dharmono Hardjowidjono, Penerj.). Yogyakarta: UGM Press.
- Sarwono, S. W. (1998). *Perbedaan Antara Aktivistis dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Sinaga, Y. M. (2018). *Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Padang dalam Gerakan Mahasiswa Tahun 1990-1998 di Kota Padang* (Skripsi, Universitas Negeri Padang). Universitas Negeri Padang. Diambil dari <http://repository.unp.ac.id/21244/>
- Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Smelser, N. (1970). *Theory of Collective Behaviour*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Sudarto. (2013). *Gerakan Refomasi di Sumatera Barat tahun 1998: Mazhab IAIN Imam Bonjol*. Naskah tidak diterbitkan.
- Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i2.15>
- Suwirta, A. (1998). Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 4(4), 13.
- Zed, M. (2019). *Alam Takambang Jadi Guru: Universitas Negeri Padang (1954-2018)*. Padang: UNP Press.